

SISTEM INFORMASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Studi di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)

Heri Budianto

heribudianto632@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Pengambilan Keputusan (Studi di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Penelitian ini dilakukan atas dasar tidak adanya keefektifan camat dalam mengambil keputusan, dengan adanya sistem informasi pengambilan keputusan mampu mendukung camat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang sistem informasi yang sedang dibicarakan ini, unsur-unsur mesin seperti komputer dan program komputer bersifat relatif tertutup dan deterministik, sedangkan unsur-unsur manusia merupakan sistem terbuka dan probabilistic, seperti pertemuan rutin dan musyawarah berjenjang. Penggunaan manusia dan mesin dalam suatu sistem merupakan sistem manusia mesin. Ragam kombinasi manusia dengan mesin dalam hal ini dapat terjadi dan dilakukan untuk sistem informasi. Sebagai suatu sistem, sistem informasi dan semua substansinya dapat ditelaah dan dipahami dalam lingkup konsep sistem. Sistem informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai instruksi dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk informasi. maka penelitian yang akan penulis lakukan termasuk metode penelitian deskriptif dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu model studi kasus. Hasil penelitian sistem informasi pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik namun masih perlu pengembangan model-model pengembangan yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang belum maksimal seperti keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan seringnya terjadi pemadaman listrik bergilir wilayah madura. Saran akademis yang dapat dilaksanakan yakni regulasi dan penguatan kewenangan camat di wilayah naungannya sesuai standar otonomi daerah. Saran praktis perlu adanya pengelolaan model sistem informasi pengambilan keputusan yang lebih baik lagi.

Kata kunci: sistem informasi, pengambilan keputusan

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kegiatan pemerintah mengalami suatu perubahan yang bersifat signifikan. Jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, segala sesuatu tergantung petunjuk dari pusat. Adanya undang-undang ini memberikan angin segar bagi daerah terutama kabupaten dan kota untuk melaksanakan otonomi secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat

daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Periode Reformasi merupakan pembalikan sentralisasi Orde Baru ke arah desentralisasi yang membawa harapan besar bagi tumbuhnya era otonomi daerah (Haris 2012: 10). Secara lebih mendalam Brantas mengatakan, “Fungsi pertama menyangkut pemberian saran penyelesaian, informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lancar.” (Irham Fahmi, 2016:151). Sebagaimana halnya dengan Camat, sebagai seorang pemimpin di level kecamatan sudah pasti banyak menghadapi berbagai macam masalah di lapangan. Berbagai macam masalah dari tingkatan yang paling sulit dipecahkan dan dilematis sampai dengan masalah-masalah ringan yang mudah untuk dipecahkan.

Untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, maka diperlukan pula suatu data dan informasi yang akurat dari suatu permasalahan yang dihadapi. Keakuratan data dan informasi yang diperoleh turut berperan dalam menentukan keputusan yang diambil secara tepat dan akurat pula. Dengan kata lain, untuk sampai pada tahap proses pengambilan keputusan sangat diperlukan peranan sistem informasi baik yang berasal dari intern suatu kantor maupun dari pihak luar.

Kecamatan mempunyai kedudukan strategis sebagai aparat pemerintah terdepan yang membina desa dan kelurahan dan secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat. Pemberian pelayanan di tingkat kecamatan berarti mendekatkan pada masyarakat yang sebagian besar jenis pelayanan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan. Aparat pemerintah wilayah Kecamatan Lenteng merupakan cermin pemerintahan bagi rakyat sehingga suksesnya kebijaksanaan pemerintahan di tingkat bawah banyak ditentukan oleh kecamatan. Maka dari itu, diperlukan Sistem informasi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan

organisasi kecamatan, dengan maksud agar seorang Camat memberikan perhatian masalah sistem informasi dalam mengambil keputusan. Sistem informasi merupakan alat penunjang untuk mempermudah pengambilan keputusan. Sebelum sampai pada suatu keputusan, seorang pimpinan dalam hal ini Camat Lenteng pasti membutuhkan data dan informasi awal tentang suatu perkara atau masalah yang dihadapi. Tanpa adanya data dan informasi awal dan informasi tambahan, dengan sendirinya keputusan yang diambil oleh seorang camat akan sukar untuk diputuskan.

KAJIAN TEORITIS

1. Sistem Informasi

Dalam mengawali pembahasan ini, penulis berangkat dari pendapat Ais Zakiyudin dalam bukunya “Sistem Informasi Manajemen”, tentang definisi sistem yang menyebutkan bahwa : “Gordon B. Davis, mendefinisikan system sebagai seperangkat unsur-unsur, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama .”. Sedangkan menurut Raymond McLeod Jr, system adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. (Ais Zakiyudin, 2012: 5)

Beberapa elemen atau unsur yang membentuk sebuah system, yaitu :

- a. Tujuan (goal) setiap system memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menjadi daya dorong atau motivasi yang mengarahkan ke arah mana system bergerak. Secara khusus, tujuan system informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani.
- b. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam system dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses.
- c. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna.
- d. Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan yang bias berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan dan lain lain.

e. Mekanisme pengendalian dan umpan balik dilakukan dengan menggunakan umpan balik (feedback) dari keluaran.

Batas (boundary) adalah pemisah antara system dan daerah di luar system.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. (Davis,1999)

(Zakiyudin, 2012:10) Informasi seyogyanya dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Agar benar-benar mampu memberikan dukungan kepada proses pengambilan keputusan manajerial dan agar aplikasinya tepat, informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi harus memenuhi persyaratan kelengkapan, kemitakhiran, kehandalan, terolah, dengan baik, tersimpan dengan rapi, dan mudah ditelusuri dari tempatnya apabila diperlukan.

Persyaratan-persyaratan tersebut hanya mungkin terpenuhi apabila data, yang merupakan bahan baku untuk informasi digali dari sumber-sumber yang tepat dan dengan mutu yang tinggi. Seperti diketahui bahwa, data tidak mempunyai nilai intrinsik dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber memerlukan pengolahan lebih lanjut agar sifatnya berubah menjadi informasi yang memiliki nilai sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan. (Zakiyudin, 2012:11).

Selanjutnya dari beberapa pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan definisi sistem informasi dengan mengutip pendapat dari Zakiyudin dalam bukunya "System Informasi Manajemen" system informasi adalah suatu system yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang yang diperlukan.

2. Pengambilan Keputusan

Lahirnya suatu keputusan tidak serta merta berlangsung secara sederhana, sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran hingga akhirnya terjadinya suatu pengkristalan dan lahirnya keputusan tersebut. Proses Pengambilan Keputusan (Irham Fahmi, 2016:5). Pengambilan keputusan memiliki sifat kontekstual. Hal ini dikarenakan :

1. Pengambilan keputusan tidak berlangsung dalam suasana vakum.
2. Pengambilan keputusan berlangsung dalam rangka kehidupan organisasional.
3. Pengambilan keputusan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Pengambilan keputusan menyangkut berbagai model, tehnik dan prosedur yang bersifat universal akan tetapi diterapkan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi, waktu dan tempat.
5. Pengambilan keputusan pada analisa terakhir diukur dengan implementasinya.
6. Pengambilan keputusan merupakan fungsi yang amat penting dalam keseluruhan proses administrasi dan manajemen.

Menurut Siagian(1983: 83), pengertian pengambilan keputusan adalah "suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat".

Pengertian dari Siagian ini menunjukkan lima hal dengan jelas, yaitu :

1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
2. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara "sembrono" karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu.
3. Bahwa sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas,

perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah pemecahan masalah dengan sebaik-baiknya.

4. Bahwa pemecahan masalah tidak dapat dilakukan melalui “ilham” atau dengan mengarang, akan tetapi harus didasarkan kepada fakta-fakta yang terkumpul dengan sistematis, terolah dengan baik dan tersimpan secara teratur sehingga fakta-fakta data itu sungguh-sungguh dapat dipercaya.
5. Bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada setelah alternatif-alternatif itu dianalisa dengan matang.

Pengambilan keputusan dapat juga diartikan sebagai suatu teknik untuk memecahkan suatu masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada tujuh langkah yang perlu diambil dalam usaha memecahkan masalah dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah itu adalah :

- 1 Mengetahui hakekat daripada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya.
- 2 Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan
- 3 Mengolah fakta-fakta dan data tersebut
- 4 Menentukan beberapa alternative yang mungkin ditempuh
- 5 Memilih cara pemecahan dari alternative-alternatif yang telah diolah dengan matang
- 6 Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan
- 7 Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. (Irham Fahmi, 2016:35)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengamati suatu obyek dari sekelompok manusia, suatu keadaan, suatu proses yang terjadi di dalam pengambilan keputusan oleh seorang Camat. Berdasarkan definisi yang ada, maka penelitian yang akan penulis lakukan termasuk metode penelitian

deskriptif dengan ruang lingkup yang lebih kecil yaitu model studi kasus. Definisi metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Untuk studi kasus penulis mencoba memberikan deskripsi mengenai peranan sistem informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Camat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” karya Rulam Ahmadi Penelitian lapangan kualitatif tidak mempunyai desain penelitian yang dipaket sebelumnya. Lebih dari itu, metode-metode pengumpulan data yang spesifik, dan pola-pola analisis yang digunakan untuk menciptakan desain pertanyaan spesifik yang unik yang mencakup seluruh proses penelitian. Desain kualitatif atau lapangan ini mengambil bentuk, baik suatu studi kasus. (Ahmadi, 2014:69).

Adapun Fokus dari penelitian ini adalah

1. Peran sistem informasi dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan Camat di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Upaya-upaya dilakukan oleh Camat Lenteng Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan penggunaan sistem informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukannya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Lokasi penelitian berada di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Sumber data yang diperoleh adalah dari data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Di dalam menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi karena menggabungkan dari teknik yang ada yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan

adalah peneliti sendiri serta dibantu dengan alat bantu seperti pedoman wawancara, perekam suara dan kamera. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi di Kecamatan Lenteng

Sebelum sampai pada suatu keputusan, seorang pimpinan dalam hal ini Camat Lenteng pasti membutuhkan data dan informasi awal tentang suatu perkara atau masalah yang dihadapi. Tanpa adanya data dan informasi awal dan informasi tambahan, dengan sendirinya keputusan yang diambil oleh seorang camat akan sukar untuk diputuskan. Hasil wawancara dengan Camat : “Sistem informasi akan kita jadikan pijakan atau acuan dalam mengelola sebuah pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasi dalam hal ini kecamatan”. Jalannya informasi bermula dari datangnya keputusan, perintah, instruksi, pesan dan nasehat dari camat kepada unit-unit operasional. Kegiatan yang dilaksanakan ini menimbulkan data operasional yang keseluruhannya dimasukkan di bank data. Namun data yang bersumber dari kegiatan-kegiatan operasional saja tidak cukup untuk dijadikan bahan untuk memperoleh informasi yang cukup. Kaitannya dengan hal ini bahwa data perlu diolah lebih lanjut menjadi informasi. Informasi inilah yang disalurkan kepada pimpinan atau manajer (termasuk Camat Lenteng) untuk mengambil keputusan. Sistem informasi digunakan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi, dalam arti bahwa seorang pimpinan atau Camat memberikan perhatian masalah sistem informasi. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian sistem informasi yang ada di Kecamatan Lenteng yang dimaksud disini adalah seperti : surat-surat masuk, surat-surat keluar, telaahan staf, laporan dari masyarakat, buku-buku pedoman pelaksanaan pekerjaan, penyimpanan arsip surat, rapat staf,

musyawarah dengan masyarakat, komunikasi camat dengan bawahan, komunikasi camat dengan masyarakat, komunikasi camat dengan unsur MUSPIKA. Dari semua unsur tersebut dalam sistem informasi pada saatnya akan dibutuhkan oleh camat dan sangat membantu sekali dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat pada hakekatnya adalah memecahkan permasalahan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tidak akan dicapai bila masalah tidak dapat dipecahkan. Tujuan-tujuan yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut tujuan organisasi kecamatan (Kecamatan Lenteng), akan tetapi tujuan-tujuan dalam kehidupan di masyarakat dalam wilayah Kecamatan Lenteng.

Sesuai hasil wawancara Camat Lenteng “sistem informasi di Kecamatan Lenteng dalam penggunaan dan pengembangannya mempertimbangkan unsur-unsur seperti surat masuk-keluar, telaahan staf, laporan dari masyarakat, buku-buku pedoman pelaksanaan pekerjaan, penyimpanan arsip surat, rapat staf, musyawarah dengan masyarakat, komunikasi camat dengan bawahan, masyarakat, dan MUSPIKA. Ini sangat membantu camat dalam mendukung pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi kecamatan”

Penggunaan dan peningkatan kebutuhan akan informasi di kecamatan ini terlihat pada saat menyusun program pembangunan di Kecamatan Lenteng yang didapat dari hasil pertemuan rutin berjenjang mulai dai tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), desa, sampai dengan tingkat kecamatan. Mulai dari tingkat RT yang membahas tentang usulan kegiatan pembangunan untuk lingkungan RT yang bersangkutan. Tahap berikutnya dimusyawarahkan dalam pertemuan di tingkat desa mengenai usulan pembangunan desa (Musbangdes). Hasil musyawarah pembangunan desa kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan ke tingkat kecamatan yang dibahas dalam pertemuan yang namanya musyawarah tingkat kecamatan atau jauh lebih sering dikenal dengan istilah pertemuan UDKP (Unit Daerah

Kerja Pembangunan) Saluran atau media berupa pertemuan, rapat-rapat dan musyawarah termasuk memberikan salah satu unsur system informasi yang bias diberikan kepada Camat Lenteng, untuk selanjutnya Camat Lenteng menentukan atau memutuskan program-program pembangunan apa saja yang menjadi skala prioritas, untuk kemudian diteruskan oleh Camat ke pertemuan di tingkat kabupaten yang dinamakan dengan rapat koordinasi tingkat II (Rakorbang II).

Senada dengan hasil wawancara Sekcam Lenteng: “Pak Camat selalu berupaya menggunakan dan meningkatkan sistem informasi melalui rapat musyawarah rutin berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kecamatan, bahkan sampai Kabupaten. Tentunya keputusan yang dibuat akan tepat sasaran”. Untuk ruang lingkup intern di Kantor Sekretariat Kecamatan Lenteng, Camat memberikan arahan kepada staf pegawai Kecamatan Lenteng untuk menyusun dan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan untuk kantor seperti Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan kantor, menyusun anggaran rutin kantor, membayar tagihan kantor dan sebagainya.

Camat memperoleh informasi dari staf pegawai tentang kebutuhan-kebutuhan kantor yang telah diinventarisir, baik itu kebutuhan barang-barang berupa alat tulis kantor, maupun usulan anggaran rutin untuk operasional kecamatan, berupa biaya-biaya perjalanan dinas, biaya tagihan listrik dan biaya pemeliharaan kantor.

Sesuai hasil wawancara dengan staff kecamatan :”kami mendapat arahan dari pak camat bahwa inventrisir kebutuhan operasional berkenaan kebutuhan kantor seperti Alat Tulis Kantor (ATK) dan lain lain. Untuk mempermudah serta mendukung camat dalam mengambil keputusan, dibantu dari sisi administrasi ketatausahaan”.

2. Upaya-upayapeningkatan penggunaan sistem informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.

Upaya peningkatan penggunaan sistem informasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Camat Lenteng terutama dikaitkan dengan penyusunan rencana program pembangunan untuk Kecamatan Lenteng, pada dasarnya memiliki kaitan yang erat. Data dan informasi tentang usulan rencana program pembangunan timbul mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Sesuai hasil wawancara dengan Sekcam Lenteng :”program pembangunan Kecamatan Lenteng berbasis data dan informasi yang diperoleh dari desa sampai ke Kecamatan Lenteng”.

Berikut ini akan di bahas tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (bottom up planning), secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1) Pada tingkat desa/kelurahan

Perencanaan pembangunan pada tingkat desa/kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Setiap tahun sedini mungkin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (dulu dikenal dengan LKMD) dengan dipimpin oleh kepala desa/lurah dan dengan bimbingan camat dan dibantu kepala seksi pembangunan melalui musyawarah pembangunan desa (MUSBANGDES) mengadakan kegiatan inventarisasi potensi desa/kelurahan, permasalahan-permasalahannya dan sekaligus saran-saran

b) Selanjutnya penyusunan usulan rencana program/proyek pembangunan yang baik yang dibiayai dengan wadaya desa sendiri maupun yang diusulkan untuk dibiayai oleh Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes), APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN, diteruskan oleh kepala desa/kelurahan kepada camat guna dibahas dalam temu karya pembangunan tingkat kecamatan.

Senada dengan hasil wawancara dengan staff kecamatan :”setiap tahun kami juga membantu menyiapkan musyawarah

pembangunan desa untuk pemetaan potensi desa yang akan diteruskan ke tingkat kecamatan”.

2) Pada tingkat kecamatan

Perencanaan pembangunan pada tingkat desa/kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Temu kaya pembangunan pada tingkat kecamatan dilakukan baik dalam bentuk diskusi Unit Daerah Pembangunan (UDKP) maupun dalam bentuk kaya-karya LPM yang dipimpin oleh camat dengan bimbingan Ketua Bappeda Kabupaten dan dibantu oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dengan tujuan membahas kembali rencana proyek pembangunan hasil musyawarah pembangunan desa guna memperoleh keterpaduan dengan proyek tingkat kecamatan.

b) Peserta temu karya pembangunan tingkat kecamatan, baik dalam temu karya LPM maupun diskusi UDKP adalah semua Ketua LPM dalam wilayah kecamatan dan aparat dinas serta instansi vertikal.

c) Temu karya pembangunan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

- Usul rencana proyek yang akan dibiayai oleh swadaya masyarakat maupun Dana Pembangunan Desa (DPD)
- Usul rencana proyek yang dibiayai oleh APBD kabupaten, APBD propinsi, maupun APBN diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan daerah (RAKORBANG) Kabupaten.

Gambar Kegiatan Musrenbangcam



Kegiatan Musrenbangcam merupakan tindak lanjut dari [Musrenbangdes](#) yang telah dilaksanakan sebelumnya di 20 desa se-Kecamatan Lenteng, tujuannya untuk

mengkompilasi semua program yang diusulkan Pemerintah Desa dan menentukan program prioritas. Melalui [Musrenbangdes](#) sebagai sarana sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan untuk mengkolaborasi usulan pemerintah desa. Kemudian usulan tersebut dibawa ke Musrenbangcam dalam rangka menentukan program prioritas.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Camat Lenteng :”dalam Musrenbangcam program yang diusulkan pemerintah desa akan di skala prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan sebagai sarana sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan untuk kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten dalam rangka menentukan program prioritas”.

Sejak adanya perubahan (reformasi) berdampak pula kepada sistem pemerintahan dan perencanaan di tingkat bawah. Mekanisme perencanaan pembangunan yang idealnya digambarkan seperti di atas, sudah jarang dilaksanakan. Seperti halnya di Kecamatan Lenteng, usulan rencana program dan proyek pembangunan jarang melalui pertemuan di tingkat desa, akan tetapi kepala desa dibantu dengan aparat desa lainnya melakukan inventarisir proyeknya did esanya. Hasil inventarisir proyek yang ada di desa tersebut kemudian dilaporkan langsung kepada camat untuk ditindaklanjuti dan dibawa dalam forum RAKORBANG Kabupaten.

PEMBAHASAN

1. Sistem Informasi di Kecamatan Lenteng

Sistem informasi merupakan alat penunjang untuk mempermudah pengambilan keputusan. Sebelum sampai pada suatu keputusan, seorang pimpinan dalam hal ini Camat Lenteng pasti membutuhkan data dan informasi awal tentang suatu perkara atau masalah yang dihadapi. Tanpa adanya data dan informasi awal dan informasi tambahan, dengan sendirinya keputusan yang diambil oleh seorang camat akan sukar untuk diputuskan.

Arus informasi dimulai dengan mengalirnya keputusan, perintah, instruksi, pesan dan nasehat dari pimpinan kepada unit-unit operasional. Dari kegiatan-kegiatan pelaksanaan timbul data operasional yang kesemuanya ditampung dalam bank data. Akan tetapi data yang bersumber dari kegiatan-kegiatan operasional saja tidak cukup untuk dijadikan bahan untuk diolah sehingga diperoleh informasi yang cukup.

Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa data tidak ada gunanya bagi manajer atau pimpinan untuk mengambil keputusan karena data adalah bahan mentah daripada informasi. Data perlu diolah lebih lanjut menjadi informasi. Data adalah "input" dan informasi adalah "output". Dengan adanya pengolahan atau analisa data, maka data berubah menjadi informasi. Informasi inilah yang disalurkan kepada pimpinan atau manajer (termasuk Camat Lenteng) untuk mengambil keputusan.

Sistem informasi dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi, dimaksudkan adalah bahwa seorang Camat memberikan perhatian masalah sistem informasi.

Kesemua unsur dalam sistem informasi pada saatnya akan dibutuhkan oleh camat dan sangat membantu sekali dalam proses pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat pada hakekatnya adalah memecahkan permasalahan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan tidak akan dicapai bila masalah tidak dapat dipecahkan. Tujuan-tujuan yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut tujuan organisasi kecamatan (Kecamatan Lenteng), akan tetapi tujuan-tujuan dalam kehidupan di masyarakat dalam wilayah Kecamatan Lenteng.

Kebutuhan akan informasi di kecamatan ini dapat terlihat misalnya pada saat :

- a. Menyusun program pembangunan di Kecamatan Lenteng yang dikembangkan dari hasil pertemuan berjenjang mulai dai tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai dengan tingkat kecamatan.

Hasil pertemuan berjenjang dimaksud disini adalah pertemuan yang diadakan

oleh masyarakat mulai dai tingkat RT yang membahas tentang usulan kegiatan pembangunan untuk lingkungan RT yang bersangkutan. Tahap berikutnya dimusyawarahkan dalam pertemuan di tingkat desa mengenai usulan pembangunan desa (Musbangdes).

Hasil musyawarah pembangunan desa kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan ke tingkat kecamatan yang dibahas dalam petemuan yang namanya musyawarah tingkat kecamatan atau jauh lebih sering dikenal dengan istilah pertemuan UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan)

Saluran atau media berupa pertemuan, rapat-rapat dan musyawarah termasuk memberikan salah satu unsur system informasi yang bias diberikan kepada Camat Lenteng, untuk selanjutnya Camat Lenteng menentukan atau memutuskan program-program pembangunan apa saja yang menjadi skala prioritas, untuk kemudian diteruskan oleh Camat ke pertemuan di tingkat kabupaten yang dinamakan dengan rapat koordinasi tingkat II (Rakorbang II).

- b. Menyusun rencana kegiatan kebutuhan kantor kecamatan

Untuk ruang lingkup intern di Kantor Sekretariat Kecamatan Lenteng, Camat memberikan arahan kepada staf pegawai Kecamatan Lenteng untuk menyusun dan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan untuk kantor seperti Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan kantor, menyusun anggaran rutin kantor, membayar tagihan kantor dan sebagainya.

Camat memperoleh informasi dari staf pegawai tentang kebutuhan-kebutuhan kantor yang telah diinventarisir, baik itu kebutuhan barang-barang berupa alat tulis kantor, maupun usulan anggaran rutin untuk operasional kecamatan, berupa biaya-biaya perjalanan dinas, biaya tagihan listrik dan biaya pemeliharaan kantor.

Pengolahan atau manajemen sistem informasi yang dilakukan di Kantor

Kecamatan Lenteng masih bersifat semi komputer. Pengolahan sistem informasi memadukan data-data manual dan komputer. Jika dibandingkan dengan pengolahan sistem informasi yang lebih modern dengan menggunakan teknologi, seperti halnya penggunaan komputer tentu hasil ketikan dan naskah surat akan lebih cepat dan kualitasnya akan lebih baik. Ada beberapa alasan mengapa di Kantor Kecamatan Lenteng belum bisa menerapkan sistem informasi manajemen yang lebih modern. Hal ini disebabkan karena :

- a. Terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk biaya operasional kecamatan, sehingga tidak memungkinkan pihak Kecamatan Lenteng untuk membeli perangkat komputer.
- b. Sering terjadinya pemadaman listrik oleh PLN dikarenakan perbaikan instalasi listrik wilayah Madura.

Sistem informasi manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses yang terdiri dari adanya masukan (input), adanya proses dan adanya keluaran (output). Jika dikaitkan lagi dengan proses pengambilan keputusan, maka dapat dijelaskan bahwa inputnya adalah berupa informasi, dan outputnya adalah berupa keputusan. Input yang diterima oleh Camat Lenteng adalah informasi yang didapat bisa dari bawahan (staf pegawai kecamatan), dari kepala desa, dari unsur Muspika bahkan dari warga masyarakat yang melaporkan tentang suatu masalah.

Semua informasi yang didapat oleh Camat Lenteng akan disaring dan dibicarakan dalam forum rapat atau pertemuan. Pada dasarnya rapat, pertemuan atau musyawarah merupakan media atau sarana untuk mengambil keputusan. Camat dalam menentukan sesuatu selalu mengadakan rapat, baik itu rapat staf, rapat dengan Muspika, rapat dengan kepala-kepala desa se kecamatan Lenteng, maupun rapat dengan warga masyarakat Lenteng.

2. Upaya peningkatan penggunaan sistem informasi pengambilan keputusan

Upaya peningkatan penggunaan sistem informasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Camat Lenteng terutama dikaitkan dengan penyusunan rencana program pembangunan untuk Kecamatan Lenteng, pada dasarnya memiliki kaitan yang erat. Data dan informasi tentang usulan rencana program pembangunan timbul mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Berikut ini akan di bahas tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari bawah ke atas (bottom up planning), secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Pada tingkat desa/kelurahan

Perencanaan pembangunan pada tingkat desa/kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap tahun sedini mungkin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (dulu dikenal dengan LKMD) dengan dipimpin oleh kepala desa/lurah dan dengan bimbingan camat dan dibantu kepala seksi pembangunan melalui musyawarah pembangunan desa (MUSBANGDES) mengadakan kegiatan inventarisasi potensi desa/kelurahan, permasalahan-permasalahannya dan sekaligus saran-saran
- b. Selanjutnya penyusunan usulan rencana program/proyek pembangunan yang baik yang dibiayai dengan wadaya desa sendiri maupun yang diusulkan untuk dibiayai oleh Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes), APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN, diteruskan oleh kepala desa/kelurahan kepada camat guna dibahas dalam temu karya pembangunan tingkat kecamatan.

2. Pada tingkat kecamatan

Perencanaan pembangunan pada tingkat desa/kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Temu kaya pembangunan pada tingkat kecamatan dilakukan baik dalam bentuk diskusi Unit Daerah Pembangunan

(UDKP) maupun dalam bentuk karya LPM yang dipimpin oleh camat dengan bimbingan Ketua Bappeda Kabupaten dan dibantu oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dengan tujuan membahas kembali rencana proyek pembangunan hasil musyawarah pembangunan desa guna memperoleh keterpaduan dengan proyek tingkat kecamatan.

- b. Peserta temu karya pembangunan tingkat kecamatan, baik dalam temu karya LPM maupun diskusi UDKP adalah semua Ketua LPM dalam wilayah kecamatan dan aparat dinas serta instansi vertikal.
- c. Temu karya pembangunan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut :
 - Usul rencana proyek yang akan dibiayai oleh swadaya masyarakat maupun Dana Pembangunan Desa (DPD)
 - Usul rencana proyek yang dibiayai oleh APBD kabupaten, APBD propinsi, maupun APBN diteruskan kepada Bupati untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan daerah (RAKORBANG) Kabupaten.

Sejak adanya perubahan (reformasi) berdampak pula kepada sistem pemerintahan dan perencanaan di tingkat bawah. Mekanisme perencanaan pembangunan yang idealnya digambarkan seperti di atas, sudah jarang dilaksanakan. Seperti halnya di Kecamatan Lenteng, usulan rencana program dan proyek pembangunan jarang melalui pertemuan di tingkat desa, akan tetapi kepala desa dibantu dengan aparat desa lainnya melakukan inventarisir proyeknya di desanya. Hasil inventarisir proyek yang ada di desa tersebut kemudian dilaporkan langsung kepada camat untuk ditindaklanjuti dan dibawa dalam forum RAKORBANG Kabupaten.

SIMPULAN

Pengelolaan sistem informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan

yang dilakukan oleh Camat pada Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sangat memegang peranan penting, karena tanpa adanya data dan informasi yang diterima akan menjadi sulit untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Data belum memiliki arti dan makna jika data tersebut tidak diolah atau dianalisa dahulu untuk menjadi suatu informasi. Data yang diperoleh secara benar dan akurat akan menghasilkan informasi yang benar dan akurat sehingga keputusan yang diambilpun akan benar dan akurat pula. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang bersifat menentukan yang menyangkut sesuatu atau keadaan. Di setiap organisasi, pengambilan keputusan merupakan tugas dan kewajiban setiap manajer, pimpinan termasuk pula camat yang ada dalam organisasi Kantor Kecamatan Lenteng. Pada dasarnya pengambilan keputusan berawal dari adanya suatu masalah, kemudian dicari data dan informasi tentang penyebabnya, dibuat alternatif pemecahan masalah dan kemudian diambil suatu keputusan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat pada Kantor Kecamatan Lenteng terdiri dari beberapa jenis keputusan. Beberapa jenis keputusan tersebut antara lain keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan menyangkut organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pembinaan warga masyarakat, keamanan dan ketertiban dan pemerintahan umum lainnya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Camat Lenteng yang berkaitan dengan bidang pembangunan seperti keputusan mengenai penyusunan rencana pembangunan di kecamatan. Proses pengambilan keputusan juga memiliki keterkaitan dengan perencanaan. Hal ini terlihat kalau dilihat dalam konteks proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh camat pada saat penyusunan rencana proyek dan proyek pembangunan untuk Kecamatan Lenteng yang diusulkan oleh masing-masing desa. Camat dapat memutuskan apakah usulan dari desa-desa tersebut diteruskan semua ke tingkat kabupaten dan camat juga bisa menyeleksi usulan program dan proyek

pembangunan yang memiliki fakta skala prioritas untuk diteruskan ke dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKOBANG) tingkat kabupaten. Mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up planning) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan melalui rapat-rapat atau pertemuan yang dikenal dengan istilah musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes), saat ini jarang dilaksanakan dikarenakan kurangnya biaya untuk melaksanakan musyawarah tersebut. Kepala-kepala desa dengan dibantu oleh aparat desa lebih sering melakukan inventarisir tentang proyek-proyek yang diusulkan. Hasil inventarisir proyek ini disampaikan kepada camat.

SARAN

Saran Akademis

1. Sistem informasi memegang peranan penting membantu dalam membantu camat dalam mengambil keputusan. Prasyarat untuk mengambil keputusan dengan teknik ilmiah adalah tersedianya sistem informasi yang dibutuhkan sebagai alat pembantu proses pengambilan keputusan.
2. Data perlu diolah lebih lanjut menjadi informasi. Data adalah “input” dan informasi adalah “output”. Dengan adanya pengolahan atau analisa data, maka data

berubah menjadi informasi. Informasi inilah yang disalurkan kepada pimpinan atau manajer (termasuk Camat Lenteng) untuk mengambil keputusan.

Praktis

1. Sistem informasi pengambilan keputusan camat di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perlu adanya penganggaran yang cukup, agar camat dalam menggunakan sistem informasi pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.
2. Sistem informasi pengambilan keputusan camat di Kantor Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep perlu adanya genset atau diesel untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik wilayah Madura, agar camat dalam menggunakan sistem informasi pengambilan keputusan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam, 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Fauzi, Gamawan. 2010. “Paradigma Kewenangan Daerah yang Efektif dan Efisien”. Prisma, Volume 29, Nomor 3, Juli. Hlm. 74-83.
- Fahmi, Irham, (2016), “Pengambilan Keputusan”. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Gasperz, Vincent, (1988), Sistem Informasi Manajemen Suatu Pengantar (buku terjemahan), Amrico, Bandung.
- Hadiz, Vedi R. 2005. “Desentralisasi dan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Kritik terhadap Perspektif Neo-Institusionalis”. Dalam Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES. Hlm. 272-304
- Haris, Syamsudin, 2014. “Desentralisasi Asimetris, Problem atau Solusi?”. Dalam Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Jakarta: Pustaka Obor. Hlm. 191-218.
- Hidayat, Syarif. 2010. “Mengurai Peristiwa-Merentas Karsa : Refleksi Satu Dasa Reformasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah”. Prisma, Volume 29, Nomor 3, Juli, Hlm. 3-22.
- Jogiyanto Hartono. 1989. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Andi. Yogyakarta. Kartini

- Kartono, (1995), Teknik Pengambilan Keputusan, Gramedia, Jakarta.
- Moekijat, (1991), Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Siagian, S.P, (1983), Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Terry, George R, (1987), Principles of Management, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illionis.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 2010. "Satu abad Desentralisasi di Indonesia". Prisma, volume 29, Nomor 3, Juli. Hlm. 58-69.
- Zakiyudin, Ais. 2012. Sistem Informasi Manajemen. Erlangga, Jakarta